

BAB IV

**RELEVANSI PENELITIAN DINASTI TIONGHOA MUSLIM DENGAN
PEMBELAJARAN SEJARAH DI SEKOLAH**

A. Dinamika Konflik Masa Akhir (Sandhyakala) Majapahit dan Peranan Orang-Orang Tionghoa Muslim Dalam Kurikulum Pendidikan Sejarah Di Sekolah

Mengenai materi kesejarahan tentang kegiatan perniagaan, internalisasi jalur rempah, dan kemaritiman dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA) sebenarnya sudah dimulai sejak awal kelas X di semester ganjil dan semester genap. Dalam hal ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan secara runtut mengenai materi kegiatan perniagaan, jalur perdagangan, internalisasi jalur rempah dan kemaritiman pada mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA sebagai berikut. Pada peta kurikulum K13 dan Kurikulum Merdeka (KurMer) yang telah digagas pada masa dunia pendidikan di Indonesia yang sedang menghadapi masa pemulihan akibat Pandemi Covid-19, terdapat perbedaan dimana mengenai materi “Sejarah Jalur Rempah” sendiri baru ditambahkan pada Kurikulum Merdeka atau “KurMer” yang baru digagas pada pertengahan bulan Februari 2022 lalu.¹

¹ Artikel berjudul, “Implementasi Kurikulum Merdeka Tetap Berjalan Sesuai Rencana”, diakses dari <https://ppg.kemdikbud.go.id/news/implementasi-kurikulum-merdeka-tetap-berjalan-sesuai-rencana> pada tanggal 21 Maret 2023, pukul 14.30 WIB.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Mas Menteri Nadiem Anwar Makariem sendiri menerbitkan Kurikulum Merdeka atau KurMer pada Tahun Ajaran Baru 2022/2023 ini salah satunya sebagai salah satu program “Merdeka Belajar” untuk meningkatkan kualitas pembelajaran para peserta didik. Kurikulum Merdeka sendiri berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila atau P-5.² Materi Jalur Rempah sendiri pada Kurikulum Merdeka sendiri ditambahkan pada materi pembelajaran sejarah kelas X pada semester gasal/ganjil pada materi, “Nenek Moyang dan Leluhur Bangsa Indonesia dan Kegiatan Perdagangan Pada Jalur Rempah”. Sedangkan pada Kurikulum K13 sendiri, mengenai materi “*Internalisasi Jalur Rempah*” sendiri memang belum secara spesifik atau secara eksplisit dijabarkan dalam Kurikulum K13 ini, tetapi materi mengenai Jalur Rempah pada Kurikulum K13 sendiri terdapat pada beberapa materi di kelas X dan kelas XI untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA.

Dalam kurikulum K13 pembelajaran Sejarah Indonesia mata pelajaran (MaPel, red) Sejarah Indonesia untuk kelas X atau kelas I SMA semester genap di terdapat materi Sejarah Indonesia, “*Indonesia Pada Masa Islam*”, dimana pada Kurikulum K13 dalam Sejarah Masa Islam di pembelajaran Mata Pelajaran Indonesia yang

² Profil Penguatan Pelajar Pancasila atau “Program P-5” sendiri adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Hal ini sendiri telah sesuai dan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2020 tentang “Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024”. Diakses dalam artikel berjudul, “Profil Pelajar Pancasila”. Diakses dari <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/profil-pelajar-pancasila> pada tanggal 21 Maret 2023, pukul 15.39 WIB.

dimulai dari Jawa dan Nusantara ini kemudian dikenal dalam materi pokok “*Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*” dengan sub-tema “*Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*”, salah satunya pembahasan mengenai Kerajaan Islam Demak atau Kesultanan Demak Bintoro yang didirikan oleh Panembahan Jimbun alias Raden Patah (1478-1518 M) sebagai penguasa pertama Kesultanan Demak Bintoro. Dalam materi pembelajaran sejarah di sekolah, masa perkembangan kegamaan, peradaban, dan kebudayaan Islam bermula setelah selesainya perkembangan masa Hindu-Buddha di Jawa dan Nusantara, yaitu terhitung semenjak masa *sandhyakala* Majapahit dan timbulnya negara-negara Islam lain di Jawa dan Nusantara, yang dimulai atau didahului dengan perkembangan teori-teori kemunculan agama Islam, peranan para pedagang, pujangga, dan para ulama penyebar agama Islam, hasil-hasil kebudayaan masa Islam, dan terakhir adalah kerajaan-kerajaan bercorak agama Rasul atau Islam di Jawa dan Nusantara selepas *sandhyakala* Majapahit.

Pada kompetensi dasar (KD) 3.8 dalam Kurikulum K13 mata pelajaran Sejarah Indonesia di bangku sekolah SMA yang berjudul, “*Menganalisis Karakteristik Kehidupan Masyarakat, Pemerintah, dan Kebudayaan Pada Masa Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia dan Menunjukkan Contoh Bukti-Bukti Yang Masih Berlaku Pada Kehidupan Masyarakat Indonesia Pada Masa Kini*” memaparkan keterangan mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa yang terdiri dari tiga kerajaan Islam utama, 1) Demak Bintoro, 2) Pajang, dan 3) Mataram Islam, menganalisis kehidupan sosial-ekonomi masyarakat zaman Islam di Jawa, dan menganalisa perkembangan hasil-hasil kebudayaan zaman kerajaan-kerajaan

Islam di Jawa dari ketiga kerajaan Islam utama di Jawa yang telah di sebutkan di atas tadi.

Kompetensi Dasar 3.8 dalam Kurikulum K13 pembelajaran Sejarah Indonesia di bangku SMA berjudul, “*Menganalisis Karakteristik Kehidupan Masyarakat, Pemerintah, dan Kebudayaan Pada Masa Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia dan Menunjukkan Contoh Bukti-Bukti Yang Masih Berlaku Pada Kehidupan Masyarakat Indonesia Pada Masa Kini*”, jika mengacu pada sejarah perkembangan kehidupan politik dan sosial-ekonomi Kesultanan Demak Bintoro ini hanyalah membahas mengenai bagaimana awal-mula perkembangan Demak Bintoro yang dulunya dikenal sebagai “Alas Glagahwangi” yang di kemudian hari di babat alas oleh Raden Patah, seorang keturunan Majapahit yang memeluk Islam, putra selir Prabu Brawjaya V atau Bhatara Prabhu ring Majapahit Sri Kertabhumi namun sama sekali tidak memaparkan serta menjelaskan hal-hal atau faktor-faktor lain mengenai pendirian Kerajaan Islam atau Kesultanan Demak Bintoro ini yang sejatinya pendirian Keasultanan Demak Bintoro di wilayah yang bernama Alas Glagahwangi itu juga atas prakarsa orang-orang Tionghoa Muslim di sepanjang wilayah pesisir utara Jawa. Orang-orang yang sudah kerap kali melakukan hubungan perdagangan dengan Jawa dan Nusantara serta sudah bercokol lama di wilayah Nusantara ini pada mulanya hanya mendasarkan kegiatan mereka pada kegiatan perniagaan barang-barang perdagangan di negeri asal mereka, “*Negeri Tirai Bambu*” atau Tiongkok (Cina, red).

Namun pada perkembangan sejarahnya, memasuki masa abad XIII hingga masuk abad XV M, gelombang orang-orang Tionghoa yang datang adalah

gelombang orang-orang Tionghoa Muslim dari Kekaisaran Dinasti Ming di Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Zheng He atau Cheng Ho, seorang laksamana sekaligus perwira yang memimpin armada laut Dinasti Ming kemudian melakukan perjalanan muhibah ke berbagai negeri dan wilayah yang tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan kebesaran dan keperkasaan Dinasti Ming semata, namun yang perlu dan patut diketahui juga dalam perjalanan muhibah Laksamana Zheng He ini terdapat *hidden agenda* dari seorang Laksamana sekaligus perwira Dinasti Ming ini, yaitu dimana ia sendiri menempatkan orang-orang Tionghoa Muslim di sepanjang wilayah pesisir utara Jawa dari Jawa Timur hingga Jawa Barat. Orang-orang Tionghoa Muslim ini berbaur pula dengan orang-orang Tartar atau Mongol Muslim yang ikut mendarat ke Jawa pada abad akhir abad XIII setelah kejatuhan Singhasari dan kemudian mereka membantu keluarga dinasti Jawa yang hendak berkuasa, yaitu Nararyya Sangramawijaya dengan kelompoknya yang nantinya akan mendirikan kekuasaan Majapahit yang berpusat di Tarik pada tahun 1215 Saka/1293 M.

Selain itu, Laksamana Zheng He juga membangun jaringan rahasianya selain di Jawa juga di daratan *Nan Yang* atau Asia Tenggara, salah satunya berpusat di wilayah Champa yang terletak di wilayah Vietnam selatan. Orang-orang Tionghoa dan Champa sudah kerap kali menghiasi panggung kesejarahan Indonesia Masa Kuna atau pada masa perkembangan Hindu-Buddha, dimana hal ini dapat dibuktikan dari adanya bukti jejak orang-orang Champa dan Tionghoa dalam berbagai prasasti-prasasti sezaman maupun dalam naskah-naskah karya sastra sezaman, yang terdapat juga dalam materi Sejarah Indonesia di kelas X

semester gasal/ganjil ketika menganalisa kehidupan perpolitikan, sosial-ekonomi, dan peninggalan kebudayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Nusantara. Hal inilah yang kemudian mejadi tidak banyak diketahui baik oleh peserta didik di kelas X IPA maupun IPS termasuk juga para pendidik sejarah lainnya. Perpolitikan masa Kesultanan Demak sendiri pun pada awal pendirannya juga tidak terlepas dari konflik dengan Majapahit serta kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan Islam lainnya di Jawa dan Nusantara. Sekalipun kerajaan-kerajaan Islam itu satu corak keagamaan dengan Demak Bintoro pimpinan Raden Patah atau Panembahan Jimbun, namun mereka sama sekali menolak hegemoni kekuasaan Demak Bintoro yang berhasil menumbangkan dan menaklukkan kekuasaan Majapahit yang berpusat di Trawulan tahun 1400 Saka/1478 M. Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas, peserta didik sendiri pun juga masih belum sepenuhnya memahami bahwa dalam materi perkembangan dan teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia, salah satu teori masuknya Islam sendiri berasal dari daratan Cina atau Tiongkok, disebarkan oleh orang-orang Tionghoa Muslim, dimana dalam perkembangan berikutnya terjadi pertemuan kepentingan perniagaan dan perekonomian yang disatupadukan dengan kepentingan politik berhasil menjadi salah satu faktor yang meruntuhkan kekuasaan Majapahit di Kotaraja Trawulan tahun 1400 Saka yang sudah semakin keropos itu.

Pada Kurikulum Merdeka (KurMer, red), materi mengenai perkembangan dan internalisasi Jalur Rempah sudah mulai diberikan kepada para peserta didik SMA mulai di kelas X semester gasal/ganjil. Materi mengenai “Internalisasi Sejarah Jalur Rempah dan Kemaritiman” mulai diberikan sejak awal oleh Pendidik/Guru

Sejarah kepada para peserta didik hingga memasuki masa kelas XI untuk IPA maupun IPS. Pada perkembangannya, terdapat pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan dari perkembangan Kurikulum K13 ke Kurikulum Merdeka tadi, sehingga semakin memperkaya mengenai perspektif tenaga pendidik yang mengajar maupun siswa-siswi yang berada di bangku sekolah SMA. Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas X semester genap dengan materi, *Menganalisis Karakteristik Kehidupan Masyarakat, Pemerintah, dan Kebudayaan Pada Masa Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia dan Menunjukkan Contoh Bukti-Bukti Yang Masih Berlaku Pada Kehidupan Masyarakat Indonesia Pada Masa Kini* semakin diperkaya dan diperdalam selain mengenai “*Jalur Rempah dan Poros Kemaritiman Bangsa*” yang tidak hanya ada di kelas X semester genap semata namun juga semakin merambah ke berbagai sub-bab materi lainnya hingga memasuki materi kelas XI mengenai “*Imperliisme dan Kolonialisasi Bangsa Barat*” ketika kerajaan-kerajaan Islam lokal di Jawa dan Nusantara dengan gigih berperang mempertahankan kekuatan perdagangan dan kemaritiman bangsa, selain itu juga untuk mempertahankan mengenai pasokan perdagangan rempah-rempah yang hendak direbut oleh pihak-pihak asing tersebut. Salah satunya adalah mengenai pertentangan Kesultanan Demak Bintoro dengan pihak Portugis dimana Portugis hendak melebarkan sayap mereka ke Jawa setelah berhasil mengambil alih kekuasaan atas Malaka yang berujung pada kejatuhannya pada tanggal 24 Agustus 1511 M.

B. Arti Penting *Sandhyakala* Majapahit Tahun 1400 Saka dan Peranan Orang-Orang Tionghoa Muslim di Jawa Bagi Peserta Didik

Pada materi perkembangan dan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan Nusantara dalam pembelajaran Sejarah Indonesia di sekolah sama sekali tidak menyebutkan mengenai peranan dari kelompok orang-orang asing yang sudah lama tinggal dan melakukan hubungan dagang dengan Nusantara (Indonesia) sejak lama, salah satunya adalah peranan dari orang-orang Tionghoa ini. Materi mengenai orang-orang Tionghoa sendiri dari sejak masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa bertumbuh-kembangnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Jawa dan Nusantara perlu menjadi salah satu sorotan penting, baik bagi pemahaman dan pengetahuan para peserta didik serta tentunya bagi para pengajar/pendidik sejarah di sekolah-sekolah. Materi mengenai perdagangan baik skala nasional maupun internasional pun juga merupakan dampak daripada perkembangan jalur-jalur perniagaan atau yang kerap kali disebut sebagai, “Jalur Rempah”. Dimana dari satu wilayah ke wilayah lain selalu diawali dengan berupa kegiatan pasar, yaitu perdagangan antar wilayah, sehingga membentuk pola jaringan perniagaan dan perdagangan yang saling menghubungkan wilayah-wilayah yang strategis dan cocok disinggahi untuk kegiatan perniagaan. Perlu dicatat pula, dampak efek dari perkembangan pelayaran pencarian dan perdagangan rempah-rempah ini juga menimbulkan salah satu efek negatif dari adanya pertikaian dan pertentangan antar keyakinan (agama), salah satunya keyakinan agama lama dengan kedatangan agama baru, antara Hindu-Buddha dengan Islam, antara Islam dengan Kristen. Hal

ini perlu diberikan penekanan khusus mengingat saat ini materi bahan ajar pelajaran sejarah di bangku-bangku sekolah mengenai “Jalur Rempah” dan perdagangan berskala internasional tengah digulirkan semenjak masa pandemi oleh Kemendikbudristek Pusat. Tidak hanya itu semata, efek samping dari “Jalur Rempah” dan perniagaan berskala internasional pun bisa pula mengakibatkan dampak efek samping dari masalah-masalah perekonomian suatu negara, baik untuk pihak negara maju maupun negara yang berkembang.

Menjadi perhatian kita bersama kembali dalam hal dunia pendidikan, terutama pendidikan sejarah, bahwasannya peran serta orang-orang etnis Tionghoa kerap kali mendapatkan kecaman serta perlakuan diskriminatif semenjak lama, dimana salah satunya bahkan bisa kita temukan dari peristiwa kejatuhan Majapahit oleh karena serbuan Demak Bintoro pimpinan Sultan Demak I Jimbun (1478-1518 M). Seperti sudah disebutkan dalam pembahasan-pembahasan di atas, Panembahan Jimbun setelah berhasil menjatuhkan kekuasaan Majapahit yang berpusat di Trawulan tahun 1400 Saka menurut pemberitaan dari naskah *Malay Annals* atau *Catatan Tahunan Melayu* menempatkan salah seorang kerabatnya yang bernama Nyoo Lay Wa (1478-1485 M) yang menjadi penguasa bawahan Demak alias “Raja Majapahit Boneka Demak”. Dari situ, muncul pertikaian dan pergolakan antara pihak pedalaman dan *pasisisran* yang sedikit banyak lebih menjurus kepada stigma-stigma buruk dan konflik rasial terhadap orang-orang beretnis Tionghoa yang dimulai sejak dari masa akhir Majapahit hingga masa kini.

Contoh kasus lain yang terjadi pada masa Orde Baru sendiri, masyarakat beretnis Tionghoa mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak

menyenangkan sama sekali dari mulai persoalan mengenai agama/keyakinan yang dipeluk mereka, persoalan mengenai nama, hingga mereka dibatasi untuk mengekspresikan kesenian dan hasil oleh kebudayaan mereka yang terus berkembang dari masa ke masa. Etnis Tionghoa dianggap sebagai orang-orang asing yang bisa menguasai perekonomian warga dan rakyat Indonesia. Kedudukan etnis Tionghoa yang dianggap lebih tinggi daripada kaum pribumi pada umumnya akhirnya menimbulkan pertentangan-pertentangan serta konflik-konflik di berbagai daerah di Indonesia tanpa bisa menghargai setiap perbedaan dan pluralitas negeri ini. Pada bidang perekonomian, warga masyarakat beretnis Tionghoa sendiri menjadi pemimpin dari tempat-tempat usaha atau perusahaan dimana terdapat orang-orang pribumi yang bekerja di sana. Seperti telah disebutkan di atas pula, pada akhirnya hanya akan menimbulkan kritik serta kesenjangan-kesenjangan sosial yang akhirnya semakin memperparah konsep perbedaan maupun pluralitas itu sendiri.³

Masa *sandhyakala* Majapahit yang akhirnya juga mengakibatkan tumbuhnya emporium-emporium Islam di Jawa dan Nusantara hingga kegiatan perebutan hegemoni rempah-rempah dan kekuasaan politik atas Jawa dan Nusantara perlu menjadi perhatian kita bersama dan juga menjadi fokus kajian pembahasan bersama yang tidak hanya berkesinambungan bagi perkembangan suatu negara semata, namun bagaimana kita pun juga perlu untuk menerapkannya serta mengajarkannya bagi peserta didik di bangku-bangku sekolah. Negara sebesar

³ Yunanto Setiawan, *Dinamika Kehidupan Sosial Budaya Etnis Tionghoa di Sidoarjo Tahun 1998-2019*, Skripsi S-1 Program Studi Pendidikan Sejarah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sidoarjo, (Sidoarjo: 2020), hlm. 92-93.

Majapahit yang akhirnya tumbang karena memang sudah semakin lemah dan keropos pondasinya luar-dalam akhirnya menimbulkan celah bagi banyak musuh-musuhnya dari berbagai jurusan untuk merongrong dan merebut kontrol kuasa perdagangan atas Jawa dan Nusantara, dan laut pun menjadi salah satu sarana atau pusat untuk bisa menguasai dunia. Hal ini sama seperti dicetuskan dalam konsep atau teori Geopolitik yang dicetuskan oleh Sir Walter Raleigh dan Alfred Thler Mahan yang berbunyi demikian: *“Barangsiapa yang berhasil menguasai lautan,(maka) ia akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti sama dengan menguasai kejayaan dunia, sehingga dapat menguasai dunia.”*

Kekuasaan Majapahit atas Nusantara yang didasarkan pada kontrol atas kuasa perniagaan dan perdagangan di Jawa dan seluruh wilayah Nusantara akhirnya harus terputus dan pupus manakala pada abad XV-XVI M kerajaan-kerajaan Islam yang bertumbuh tadi berhasil menguasai sumber daya kelautan dan segala kekayaan kemaritimannya, sehingga jalur-jalur perniagaan di Jawa dan di luar Jawa menjadi dikuasai oleh mereka. Keadaan Majapahit yang sudah semakin rapuh akhirnya mengakibatkan kejatuhannya ketika ia berhasil ditumbangkan oleh serangan laskar Islam Demak dan seluruh koalisi Pantura raya beserta sekutu-sekutu Demak pada tahun 1400 Saka. Kejatuhan Majapahit yang berpusat di Kotaraja Trawulan tahun 1400 Saka ini tidaklah aneh dan tidaklah berlebihan, karena kerajaan-kerajaan Islam tadi, terkhusus Demak, telah seturut dengan teori/konsep Geopolitik dalam wawasan kelautan seperti dikemukakan oleh Sir Walter Raleigh dan Alfred Thler Mahan di atas.

Dalam Kurikulum K13 pada mata pelajaran Sejarah Indonesia, mengingat karena belum adanya pembahasan secara menyeluruh mengenai Jalur Rempah dan hal itu baru saja terlaksana pada pembahasan materi yang mengalami *advance* (peningkatan/pemutakhiran, red) mengenai studi tentang Jalur Rempah dan kaitannya dalam pembelajaran sejarah di bangku sekolah SMA untuk jenjang kelas X dan kelas XI dalam Kurikulum Merdeka, maka masih sebatas terpaku pada pembahasan materi mengenai kejatuhan Majapahit tadi tanpa melihat adanya saling ketersinambungan dengan kejatuhan Konstantinopel/Kekaisaran Romawi Timur alias Kekaisaran Byzantium akibat kealahannya dalam perang dengan Kekaisaran Turki Utsmani pimpinan Muhammad Al-Fatih pada tanggal 29 Mei 1453 M dan perubahan jalur perdagangan yang menghubungkan antara Eropa dan Asia setelah kejatuhan Byzantium di tangan Turki Utsmani ini. Selain itu, penggunaan Kurikulum Merdeka Belajar pada mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk jenjang kelas X dan kelas XI ini bisa untuk menyingkapkan mengenai hubungan antara kejatuhan Majapahit dan pendirian Kesultanan Demak Bintoro dengan peristiwa besar yang terjadi di Eropa tadi dan juga mengenai peran serta kelompok etnis Tionghoa di sepanjang wilayah pesisir utara Jawa, kedatangan Laksamana Zheng He dan para loyalis Dinasti Ming itu di wilayah Jawa dan Nusantara, pengaruh perniagaan antara Tiongkok-Malaka-Jawa, penggunaan persenjataan seperti persenjataan api dari Cina maupun Turki Utsmani, serta menyibak dengan jelas apa yang menjadi faktor kejatuhan Kerajaan Majapahit tahun 1400 Saka/1478 M atas Jawa dan Nusantara akibat intervensi Kekaisaran Ming dari Tiongkok serta perluasan pengaruh Islamisasi dari Turki Utsmani

setelah kejatuhan Konstantinopel (Byzantium) ke pihak Turki Utsmani yang telah menguasai pusat perniagaan terbesar antara Asia dan Eropa itu.

C. Keberadaan Sosok Pangeran Tan Jin Bun/Raden Patah Sebagai Simbol Multikulturalisme Dalam Masyarakat

Penguasa Demak pertama, Pangeran Tan Jin Bun alias Raden Patah (1478-1518 M) adalah salah seorang penguasa Islam dalam panggung Sejarah Indonesia pada amedio bad ke-15 dan 16 yang berhasil merealisasikan impian dan cita-citanya dimana dengan dukungan dan sokongan rakyat seluruh wilayah pesisir utara Jawa dari Jawa Timur hingga wilayah Pasundan (Jawa Barat, red) marak mendukung dan meralisasikan tujuannya untuk menggapai kekuasaan tertinggi secara politik dan kuasa perdagangan atas tanah Jawa dan Nusantara dimana ia berhasil memimpin sendiri pasukannya untuk menaklukkan Majapahit yang telah mengalami *sandhyakala*-nya pada masa akhirnya. Panembahan Palembang atau Panembahan Jimbun berhasil memenuhi seluruh harapan umat Islam dan masyarakat Islam Jawa karena sepak terjangnya yang berhasil menjatuhkan kekuasaan Majapahit di Kotaraja Trawulan tahun 1400 Saka. Sultan Jimbun dikenang dalam sejarah sebagai sang penakluk, *Al-Fatah*. Nama Arabnya yang menegaskan bahwa ia menjadi khalifah Islam pertama di Jawa yang telah berhasil membuka akes untuk pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di Jawa dengan keberhasilannya dalam menjatuhkan Majapahit di Kotaraja Trawulan ini tahun 1400 Saka/1478 M. Peristiwa besar dan heroik ini tentunya tidak hanya terpatri dalam hati dan pikiran umat Islam Jawa semata, namun para bangsawan

dan ulama Islam dari negeri-negeri jauh sekalipun memuliakan nama dan keagungannya yang besar.

Sekalipun nama Pangeran Tan Jin Bun atau Jimbun sama sekali tidak dikenal dalam historiografi kesejarahan orang-orang Tionghoa di daratan Tiongkok maupun catatan-catatan resmi Kekaisaran Tiongkok seperti *Ming Shi* maupun *Ming Shilu*, namun bisa kita tebak bahwa tak sedikit pula kaum pedagang maupun saudagar-saudagar kaya yang pernah singgah ke Jawa bisa saja menyebarkan warta tersebut ke daratan Tiongkok mengenai keberhasilan dan kemenangan gilang-gemilang Pangeran Tan Jin Bun alias Raden Patah ini. Sekalipun Kaisar Tiongkok Ming sendiri tidak mengenal siapa jati dirinya maupun sepak terjangnya.

Seperti sudah dibahas pada sub-bab sebelumnya dalam penelitian bab ini, bahwa orang-orang etnis Tionghoa adalah orang-orang asing yang kebanyakan bergerak dalam bidang perekonomian dan mereka bisa saja suatu hari menjadi tuan dengan menguasai pusat sebuah pimpinan perusahaan tadi. Hal-hal demikian kerap kali terjadi dan tidak asing lagi di kalangan warga pribumi sendiri yang akhirnya berdampak pada kesenjangan-kesenjangan sosial antara warga pribumi dengan warga beretnis Tionghoa. Maka dalam hal ini, sudah sepatutnya bagi setiap warga dan masyarakat Indonesia untuk bisa memahami arti dari konsep “pluralisme” dan “multikulturalisme” itu sendiri. Masyarakat Indonesia dan dunia yang sekarang telah memasuki “Era Industri 4.0” semenjak era pandemi covid-19 ini kini mulai bisa mengakses berbagai informasi dengan bebas dan seluas-luasnya, namun semakin hari pula maka sebagai warga masyarakat Indonesia dan

dunia pada hakekatnya tidak menyadari bahwasannya mereka mulai menjadi malas dan semakin hari menjadi semakin ketergantungan dengan gawai-gawai yang mereka miliki. Pekerjaan-pekerjaan manusia apapun mulai tergantikan dengan gawai-gawai online yang semakin banyak dinikmati serta dikonsumsi oleh warga masyarakat kita. Dampak buruk dari era Industri 4.0 juga mengakibatkan dampak lainnya, yaitu mulai hilangnya rasa kepedulian terhadap sesama yang semakin cenderung bersifat individualistis dari masa-masa sebelumnya. Manusia-manusia di masa kini semakin mempertimbangkan kehidupannya sendiri tanpa memikirkan bagaimana keadaan saudara-saudaranya maupun orang lain.⁴ Demikian pula dengan perkembangan pendidikan dan pembelajaran berbagai materi dan pendalaman mengenai narasi-narasi maupun peristiwa-peristiwa sejarah yang diajarkan kepada peserta didik di bangku sekolah maupun pada bangku perkuliahan pada era pandemi covid-19 dalam era Industri 4.0 hari-hari ini.

Dari peristiwa kemanusiaan yang menimpa orang-orang beretnis Tionghoa pada masa Orde Baru hingga masa Reformasi ini, kita bisa melihat bahwasannya kebencian dan dendam terhadap orang-orang etnis Tionghoa yang semakin terpupuk kerap kali mewarnai ragam narasi sejarah dalam negeri ini sendiri, tidak terlepas pula dengan sosok Panembahan Jimbun atau Raden Patah. Raden Patah sendiri pun akhirnya mendapati “stigma buruk” bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena aksi sepak terjangnya menjatuhkan kekuasaan Majapahit di

⁴ *Dampak Positif dan Negatif Revolusi Industri 4.0 Dalam Perekonomian dan Bisnis*, diakses dari <https://accounting.binus.ac.id/2020/07/14/dampak-positif-dan-negatif-revolusi-indutri-4-0-dalam-perekonomian-dan-bisnis/> pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 15.05 WIB.

Trawulan tahun 1400 Saka, ditambah lagi pandangan dan gunjingan-gunjingan yang membuat tokoh besar dalam sejarah ini dikucilkan dan dipojokan. Namun, terlepas dari semua itu, dalam bingkai kemasyarakatan yang plural⁵ tidak semua orang-orang Tionghoa akan selalu berat sebelah terhadap kaum dan golongan-golongannya sendiri. Orang-orang Tionghoa, baik mereka yang peranakan maupun *totok*⁶ masih tetap mengamalkan ajaran-ajaran luhur nenek moyang mereka dari masa ke masa, dimana mereka masih tetap mengamalkan ajaran-ajaran luhur dari Tri-Dharma (Buddha, Kong Hu Chu, dan Taoisme, red) untuk tetap menghargai politik, budaya, seni, tradisi, dan lingkungan warga masyarakat sekitar.⁷ Indonesia tetap tidak bisa menghapus atau melalaikan akan hal-hal yang terkait dengan pluralisme maupun multikulturalisme⁸ ini, sekalipun kerap kali banyak yang memulai konflik-konflik yang mengatasnamakan SARA dan sasaran yang disasar atau ditujukan adalah orang-orang Tionghoa itu sendiri.

Sekalipun Panembahan Jimbun berdarah Tionghoa, ia putra Maharaja Majapahit Bhatara Prabhu Sri Kertabhumi atau Bhatara Wijaya Kertabhumi (1474-1478 M), ia sendiri memahami bahwasannya masyarakat Jawa Majapahit yang telah memeluk Islam dan meninggalkan kebhaktian mereka kepada para

⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, arti kata “Pluralisme” sendiri adalah keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya). Diakses dari <https://kbbi.web.id/pluralisme> pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 15.22 WIB.

⁶ Istilah ini didasarkan pada orang-orang Tionghoa yang terlahir baik di negeri Tiongkok maupun di luar negeri Tiongkok, namun terlahir dari orangtua (ayah dan ibu) yang memiliki garis keturunan murni. Mereka masih menjalankan adat dan tradisi ajaran nenek moyang dan leluhur mereka dengan baik sekalipun ada yang terlahir jauh dari negeri asal mereka, yaitu di Tiongkok.

⁷ Yunanto Setiawan, *Op Cit.*, hlm. 95.

⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, arti kata “Multikulturalisme” sendiri adalah gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Diakses dari <https://kbbi.web.id/multikulturalisme> pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 15.34 WIB.

dewa/i pantheon Hindu dan Buddha tetap masih memerlukan suatu pedoman atau norma yang bisa diterapkan dalam sudut pandang luas dan tentunya dapat pula menenteramkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itulah maka untuk mengurangi ketegangan-ketegangan dalam masyarakat yang teguh memegang ajaran Syiwa-Buddha Jawa dan ajaran Islam, Panembahan Jimbun atau Raden Patah alias Fatihuddin dari Demak dengan dibantu para Walisongo merumuskan dan menyusun sebuah kitab undang-undang hukum yang disebut sebagai *Salokantara* atau *Selakantara*⁹, *Jugul Muda*, dan *Angger-Agger Surya Alam*.¹⁰ Ketiga kitab undang-undang hukum ini dirumuskan serta disusun oleh Panembahan Jimbun dengan dibantu oleh para Walisongo tersebut. Kitab *Salokantara* sendiri berisi 1044 (seribu empat puluh empat) contoh kasus hukum, dimana keberadaannya sendiri tidak dapat dipisahkan dengan kitab undang-undang hukum *Jugul Muda*. Pesan universal yang terkandung dalam kedua kitab undang-undang Kesultanan Demak ini, baik *Salokantara* dan *Jugul Muda*, adalah semua manusia mempunyai derajat yang sama, sebagai hamba Tuhan. Rakyat bukanlah *sahaya*¹¹ yang berhadapan dengan sang tuan. Selain itu, di sisi lain, kitab undang-undang hukum Demak *Salokantara* ini juga menegaskan bahwa pada saat itu telah terjadi dialog dan saling mengakui antara produk hukum yang digali dari

⁹ Kitab Tata Pemerintahan dan Aturan Kepegawaian Negara Demak

¹⁰ Kitab Hukum Pidana, Etika, dan Tata Pemerintahan Negara Demak

¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, arti kata “Sahaya” sendiri dapat diartikan sebagai, 1) Hamba, 2) Budak, dan 3) Abdi. Diakses dari <https://kbbi.web.id/sahaya> pada tanggal 21 Oktober 2022, pukul 13.05 WIB.

nilai-nilai ajaran lama Hindu-Buddha Jawa dan hukum Islam secara universal yang sedang berkembang di kalangan masyarakat Jawa.¹²

Menurut Kasori Mujahid (2022), ketiga kitab undang-undang hukum di Kesultanan Demak ini sendiri berisikan mengenai hukum yang mengatur hubungan sosial, hukum, perekonomian, dan politik dalam kehidupan masyarakat Jawa dan Nusantara di bawah Kesultanan Demak yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Ketiga kitab undang-undang hukum ini juga berlaku untuk semua lapisan warga masyarakat, termasuk bagi para penguasa (sultan) Demak yang dengan ikhlas pun juga dikontrol di bawah kekuasaan para Walisongo. Pihak kesultanan tidak hanya mengatur ibadah *mahdoh*, melainkan juga hukum waris, *jinayah*, dan *muamalah*.¹³ Disamping itu, terutama kitab undang-undang hukum *Salokantara*, menurut Dennys Lombard (2008) kitab undang-undang hukum ini berisikan perundang-undangan telah mengharmonikan antara hukum pada masa Hindu-Buddha Jawa dan Islam di Jawa selepas kejatuhan Majapahit.¹⁴ Dalam artian lainnya, bahwa sebenarnya naskah kitab undang-undang hukum Demak seperti *Salokantara*, *Jugul Muda*, dan *Angger Surya Alam* sendiri serta konsep sistem hierarkis Kesultanan Demak sendiri ternyata men-copy paste dari bentuk hierarkis dan kitab undang-undang hukum yang telah diberlakukan pada masa sebelumnya, yaitu pada masa Majapahit. Dengan kata lain, meskipun masyarakat

¹² Artikel berjudul, “Kitab *Salokantara* Harmoni Khazanah Hindu-Jawa dan Ajaran Islam Pada Masa Demak”, diakses dari <https://www.nusantarainstitute.com/kitab-salokantara-harmoni-khazanah-hindu-jawa-dan-ajaran-islam-pada-masa-kesultanan-demak/> pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 15.56 WIB.

¹³ Kasori Mujahid, *Di Bawah Panji Estergon Hubungan Kekhalifahan Turki Utsmani Dengan Kesultanan Demak Pada Abad XV-XVI M*, (Jakarta: Penerbit Istanbul, 2022), hlm. 203.

¹⁴ Dennys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya Jilid.2 Jaringan Asia*, terj. Winarsih Partaningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat, & Nini Hidayati Yusuf, Cet. ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 54.

peisir utara Jawa – termasuk Demak – yang umumnya sudah memeluk agama Islam, namun struktur masyarakat yang bercorak Hindu-Budha yang terstratifikasi dalam *caturwarna* atau kasta, ternyata tidak mengalami perubahan revolusioner menjadi menjadi masyarakat Muslim yang lazimnya egaliter. Sebagai contoh, apabila dalam stratifikasi *caturwarna* Hindu-Buddha puncak teratas diisi oleh golongan para rohaniwan atau golongan keagamaan seperti Acharyya, Brahmana, Wiku, Rsi, Ajar, Pandhita, Tyaga/Tyagi, Ki atau Kaki, maka pada masa Kesultanan Demak Bintoro yang berkuasa selepas kejatuhan Majapahit golongan stratifikasi teratas yang berisikan orang-orang rohaniwan atau para agamawan, konsep ini ternyata tidaklah berubah sekalipun penyebutan para golongan rohaniwan atau kelompok keagamaan mengalami perbedaan dari penyebutan dari masa Hindu-Buddha ke masa Islam seperti sebutan, 1) Susuhunan atau Sunan, 2) Raja Pandhita atau Ratu Ulama, 3) Panembahan, 4) Kyai Ageng, 5) Kyai Anom, 6) Kyai. Meski dalam hal penyebutan orang-orang kelompok “ulama” (rohaniwan-keagamaan ini, red) sedikit berbeda, namun secara substansi semua menunjukkan satu golongan atau kelas sosial yang sama, yaitu kelompok ruhaniawan-keagamaan atau orang-orang yang mengurus perihal keagamaan atau hal-hal yang bersifat kerohanian.¹⁵

Salah satu kitab yang dikenal perundang-undangan hukum yang dikenal pada masa Demak yang dipercaya ditulis oleh Sultan Fatah adalah *Angger Surya Alam*. Naskah kitab undang-undang *Angger Surya Alam* ini merupakan undang-undang

¹⁵ *Kesultanan Demak (13) Raden Patah*, dalam rubrik *Gana Islamika Mozaik Peradaban Islam*. Diakses dari <https://ganaislamika.com/kesultanan-demak-13-raden-fatah-8/> pada tanggal 21 Oktober 2022, pukul 14.01 WIB.

resmi kerajaan Demak yang berisi mengenai ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang bersumber pada tata hukum Islam dan kemudian dijadikan salah satu sumber hukum kerajaan–kerajaan berikutnya (Pajang dan Mataram). Naskah ini memberi arti penting bagi studi historis hukum di Indonesia. Naskah *Angger Surya Alam* lahir pada tahun 1507 (menurut penanggalan Jawa), sehingga saat ini telah berusia sekitar 498 tahun. Kitab undang-undang *Angger Surya Alam* yang disusun dan dibuat oleh Raden Patah ini sendiri isalin tahun 1767 M, sehingga saat ini telah berusia 238 tahun. Kitab undang-undang *Angger Surya Alam* yang dibuat pada masa Demak ini perlu diketahui umum, mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai konservasi sumber perbandingan yang otentik dalam menghadapi permasalahan hukum di Indonesia.¹⁶

Dalam pembukaan undang-undang ini disebutkan bahwa Sultan Suryangalam (Surya Alam, red) di Keraton Aripullah, negeri Adilullah, menceritakan Prabu Titi Jagad dari Ngatasangin membentuk Badan Yudikatif dengan menerapkan hukum Allah yang berlandaskan keadilan, kejujuran dan kebenaran. Sultan kemudian melimpahkan kepada jaksa untuk menangani dan memutuskan perkara hukum berdasarkan hukum Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.¹⁷ Naskah kitab undang-undang hukum *Angger Surya Alam* ini sendiri berisikan tata hukum

¹⁶ Naili Anafah, “Legalisasi Hukum Islam Di Kerajaan Demak Studi Naskah Serat Angger-Agger Surya Ngalam dan Serat Surya Ngalam”, dalam jurnal *Al-Manahij Walisongo E-Library Journal*, Vol.3, No.1, 10 Februari 2015, hlm. 4. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3471> pada tanggal 21 Oktober 2022, pukul 15.09 WIB.

¹⁷ *Angger-Agger Surya Ngalam Penetapan Syariat Islam di Kesultanan Islam Demak*, diakses dari <https://islamtoday.id/ulas-nusa/20190929123331-3273/angger-angger-surya-alam-penerapan-syariat-islam-di-kesultanan-demak/> pada tanggal 21 Oktober 2022, pukul 15.11 WIB.

Islam yang bersumber dari kitab *Anwar*, sesuai dengan formulasi dari Pangeran Adipati Ngadilaga Arya Palembang (sebutan lain Pangeran Tan Jin Bun atau Panembahan Bintara Jimbun/Raden Patah dalam kitab undang-undang ini, red) yang dituangkan dalam undang-undang oleh Pangeran Arya Trenggana atau Rodin Junior, yaitu penguasa Demak ketiga yang kala itu masih berposisi menjabat sebagai *jaksa*. Di kemudian hari kitab undang-undang Demak ini dikenal sebagai Undang-Undang Jawa Surya Ngalam (Surya Alam, red) yang masih dijadikan sebagai salah satu sumber hukum kerajaan-kerajaan Islam di Jawa selepas kejatuhan Demak, yaitu Kesultanan Pajang yang didirikan oleh Adiwijaya atau Jaka Tingkir dan Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senapati atau Danang Sutawijaya.¹⁸ Naskah *Angger-Agger Surya Alam* ini sendiri digubah oleh Prabu Surya Ngalam atau Panembahan Jimbun (1478-1518 M), yang merupakan penguasa pertama Demak Bintoro sendiri. Salinan awal dari naskah kitab undang-undang *Angger Surya Alam* merupakan teks hukum berbentuk prosa atau *gancaran* yang berisikan risalah yuridis yang secara tradisional dikaitkan penulisanya kepada Senapati Jimbun, penguasa pertama Demak pada akhir abad ke-15. Naskah kitab undang-undang *Angger-Agger Surya Alam* ini sendiri yang salah satunya tersimpan di British Library tersebut merupakan salinan dari naskah yang lebih tua (awal, red) yang telah disalin pada tahun 1767 dan 1794 M pada era Kesultanan Mataram Islam ketika terjadi

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

peristiwa *palihan nagari* antara Kasunanan Surakarta Adiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Adiningrat.¹⁹

Ketiga kitab perundang-undangan pada masa Kesultanan Demak ini dibuat dan disusun oleh Panembahan Jimbun bersama dengan Dewan Para Wali agar dapat menciptakan struktur dan keadaan masyarakat yang adil, beradab, dan damai sesuai dengan kaidah hukum Islam yang juga sama sekali tetap tidak melupakan nilai-nilai Jawa yang masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran leluhur Jawa serta nilai-nilai luhur Syiwa-Buddha Jawa sendiri. Penulis menyimpulkan bahwa naskah perundang-undangan hukum Kesultanan Demak Bintoro ini dibuat dan disusun oleh Panembahan Jimbun sebagai dampak dari penyesalannya melakukan serbuan ke Kotaraja Majapahit di Trawulan tahun 1400 Saka lalu, yang mana ia sendiri akhirnya mulai bertindak tidak dengan cara kekerasan yang dipaksakan dan tetap mematuhi nasehat serta wasiat dari ayah mertua sekaligus gurunya, Kanjeng Susuhunan ing Ampeldenta I Sayyid Ali Rahmad yang menganjurkan untuk tidak mempergunakan kekerasan senjata terhadap masyarakat Jawa yang masih teguh memeluk ajaran Syiwa-Buddha Jawa. Pada akhirnya, nasehat dan wasiat dari ayah mertua sekaligus gurunya itu dituangkannya dalam penyusunan dan pembuatan kitab undang-undang *Salokantara*, *Angger Surya Alam*, dan *Jugul Muda*.

¹⁹ Irfan Riyadi, M., Khairil Umami, "Integrasi Hukum Islam di Kerajaan Islam Demak Abad XVI Telaah Terhadap Serat *Angger Surya Alam*", dalam jurnal *ASCARYA, Islamic Science, Culture, and Social Studies*, Vol.1, No.2, 17 Oktober 2021, hlm. 257. Diakses dari <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.119> pada tanggal 21 Oktober 2022, pukul 15.48 WIB.

Menarik juga apabila kita mencermati informasi dalam naskah *Serat Dharmagandhul* bahwasannya terdapat informasi lain yang menyiratkan bahwa bahkan sejak era Kesultanan Pajang, Mataram, hingga era Kartasura masih berlaku penggunaan kitab undang-undang hukum masa Demak yang masih terus dilestarikan sekalipun Demak sendiri sudah runtuh.²⁰ Hal ini menandakan bahwasannya kitab perundang-undangan hukum Demak yang terdiri atas *Salokantara*, *Jugul Muda*, dan *Angger Surya Alam* masih dilestarikan dan dipakai sebagai landasan hukum kerajaan Islam Jawa pedalaman sesudah kejatuhan Demak Bintara. Pada naskah *Serat Dharmagandhul* Tembang atau Puisi, pupuh Dhandanggula, pada (bait) 48 penulis naskah *Serat Dharmagandhul* memberikan informasi kepada kita mengenai landasan hukum yang dipakai oleh para penguasa Islam Jawa sesudah kejatuhan Demak Bintoro yang ternyata masih memakai dan mengamalkan kitab perundang-undangan hukum Demak yang terdiri dari *Salokantara*, *Jugul Muda*, dan *Angger Surya Alam* sebagai berikut:

Mula adil adat Ratu Jawi/ awit Demak Pajang lan Mataram/ ing Kartasura watese/ tan nganggo ngowel umur/ Adil Cina kang dipun irip/ krana patokanira/ kitab ingkang ngatur/ Sultan Demak Ibu (Putri) Cina/ Awit Demak sapangandhap/ durung salin/ patokan kitab Demak

²⁰ Kekuasaan Demak terakhir dipegang oleh Arya Pangiri, salah seorang menantu Adiwijaya sekaligus bersaudara dengan Pangeran Benawa, putra mahkota Sultan Adiwijaya atau Raden Jaka Tingkir/Mas Karebet. Arya Pangiri sendiri dilantik oleh keturunan Sunan Kudus II Syekh Ja'far Shodiq, yaitu Panembahan Kudus, menjadi adipati Demak sepeninggal ayahandanya, Pangeran Mukmin alias Susuhunan Prawata (1546-1549 M) yang wafat karena dikudeta oleh Arya Panangsang, penguasa Jipang Panolan. Arya Pangiri sendiri dinikahkan dengan putri tertua dari Sultan Adiwijaya/Mas Karebet/Jaka Tingkir, yaitu Putri Pambayun, dan berhasil merebut takhta kekuasaan di Pajang sepeninggal Adiwijaya dengan dukungan Panembahan Kudus dan Adipati Tuban Arya Pamalad. Ia menjadi penguasa kedua di Pajang bergelar, "Sultan Ngawantipura" yang berkuasa sejak tahun 1583-1586 M yang akhirnya disingkirkan karena pemberontakan gabungan Benawa dan saudara angkatnya, Danang Sutawijaya alias Panembahan Senapati dari Mataram.

Terjemahan:

Oleh karena itu sudah menjadi kebiasaan para Raja Jawa (Raja Islam Jawa, red)/ dari mulai Demak, Pajang, Mataram/ serta Kartasura pada penghabisan/ sama sekali tidak menghargai kehidupan/ Mirip seperti hukum orang Cina/ karena semua berpatokan/ pada kitab aturan/ yang dibuat oleh Sultan Demak (Panembahan Jimbun/Sultan Bintara Arya Jimbun, red) yang terlahir dari ibu Putri Cina (Tan Eng Kian/Siu Ban Ci, red)/ Mulai Demak hingga para penguasa Islam Jawa ke bawah belum berganti/ masih tetap memakai acuan hukum Demak (*Salokantara*, *Jugul Muda*, dan *Angger Surya Alam*, red)

(Serat Dharmagandhul *Tembang* (puisi), pupuh 11 Dhandanggula, pada (bait 48)

Selain mempergunakan rujukan ketiga kitab undang-undang hukum tadi untuk memberikan hukum yang adil dan menciptakan keadaan serta kondisi masyarakat yang adil, tentram, dan makmur, pada masa Kesultanan Demak Bintoro diperintah oleh Sultan Jimbun atau Raden Patah salah satu cara untuk mengajarkan dan mendakwahkan agama Islam adalah dengan mempergunakan kesenian-kesenian adat tradisional yang digemari oleh masyarakat Jawa dari masa peralihan Hindu-Buddha ke Islam yaitu dipergunakannya sarana kesenian tradisional seperti gamelan dan pagelaran wayang. Sarana seperti gamelan dan wayang yang sudah ada semenjak sebelum kedatangan Islam di Jawa sudah kerap kali dipergunakan oleh masyarakat Jawa yang ketika itu masih memeluk Hindu-Buddha untuk terus mengamalkan kesenian-kesenian khas yang tentunya juga terpengaruh dari pengaruh daratan *Bhatarawarsha* ini. Kesenian-kesenian khas tradisional seperti ini umumnya tidak serta-merta ditinggalkan dan dibuang begitu saja oleh para Walisongo maupun oleh para penguasa Islam Jawa, termasuk ketika Demak merajai Jawa dan Nusantara.

Kesenian tradisional seperti wayang pun digandrungi oleh Raden Patah sendiri selaku penguasa pertama Demak Bintoro itu, dimana dengan pertimbangan dari para Wali, terkhusus Kanjeng Susuhunan ing Kalijaga atau Raden Sahid sendiri menghasilkan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, 1) Kesenian tradisional wayang perlu dan dapat diteruskan, asal diadakan perubahan-perubahan yang sesuai dengan kaidah zaman yang berlaku, 2) Kesenian tradisional wayang diubah, bagaimana dan dibuat dari bahan apa, terserah; asal tidak berwujud dewa-dewi dalam pantheon agama Hindu-Buddha, 3) Cerita-cerita dalam pewayangan yang terkait dengan cerita-cerita dewa/i agama Hindu-Buddha harus diubah dan diisi dengan paham yang mengandung jiwa Islam, 4) Kisah-kisah dalam pewayangan pun harus diisi dengan dakwah keagamaan yang mengandung keimanan ibadah, akhlak, kesusilaan, dan sopan-santun, 5) Cerita-cerita wayang yang terpisah seperti kisah *Ramayana* karya pujangga Rsi Walmiki dan *Mahabharata* karya pujangga Bhagawan Wyasa harus diubah lagi menjadi satu cerita yang bersambung dan tetap mengandung jiwa Islam, 6) Menerima tokoh-tokoh dalam cerita wayang dan kejadian-kejadian dalam kisah pewayangan tadi hanya sebagai perlambang yang tentunya perlu diberikan penafsiran tertentu sesuai perkembangan sejarah, dimana tafsiran-tafsiran tersebut harus sesuai dengan akidah ajaran Islam, 7) Pagelaran wayang harus mengikuti aturan susila dan jauh dari kemaksiatan, dan 8) Memberikan makna yang sesuai dakwah Islam pada seluruh unsur seni wayang, termasuk gamelan, tokoh-tokoh dan lakon-lakon dalam pewayangan. Pada masa pemerintahan Sultan Bintara Panembahan Jimbun, kesenian tradisional wayang dibuat pipih menjadi dua dimensional dan digambar

miring, sehingga tidak menyerupai dengan relief-relief pada candi-candi Hindu-Buddha di Jawa, tetapi lebih diperindah dan dipercantik agar tidak meniru figur wayang yang terdapat pada hiasan relief di dinding-dinding candi. Wayang pada masa Islam di Jawa sendiri dibuat dari kulit kerbau yang ditatah halus, diberi warna dasar dari tulang bubuk berwarna putih, sedangkan gambar pakaiannya diberikan warna hitam. Gambar wajah atau muka wayang dibuat miring dengan tangan menjadi satu badan (*irasan*) diberi gapit untuk menancapkan pada kayu yang diberi lubang khusus.²¹ Menurut Ong Hok Ham dalam *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, Ong menjelaskan bahwa salah satu cara orang-orang Tionghoa Peranakan dalam menjaga adat-istiadat dan kebiasaan tradisi Jawa adalah menjaga hasil kebudayaan Jawa yang mereka gemari seperti karya sastra, alat musik Gamelan, dan wayang Jawa.²² Dengan demikian, berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Ong Hok Ham ini, sebagai seorang keturunan Tionghoa Peranakan pula tentunya Raden Patah atau Sultan Demak I Panembahan Jimbun pun juga melakukan kebiasaan yang sama dalam menjaga sumbangsih kebudayaan Jawa dengan menggemari kesenian wayang ini.

Salah satu sumbangan lain Raden Patah atau Kanjeng Sultan Ngadil Surya Alam Arya Palembang ing Bintara dalam dunia kesenian wayang Islam Jawa yang ia kembangkan bersama para Walisongo adalah menciptakan *kayon* atau *kekayon* (gunungan, red) yang seringkali ditancapkan di tengah panggung kelir dan

²¹ Kesultanan Demak (14) Raden Patah (9), dalam rubrik *Gana Islamika Mozaik Peradaban Islam*. Diakses dari <https://ganaislamika.com/kesultanan-demak-14-raden-fatah-9/> pada tanggal 22 Oktober 2022, pukul 23.38 WIB.

²² Ong Hok Ham, "Tiga Macam Kebudayaan yang Mempengaruhi Cara Hidup Tionghoa Peranakan" dalam *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 50.

menciptakan simpingan. Usaha besar Panembahan Bintara Arya Jimbun dalam mengembangkan kesenian tradisional berupa wayang ini juga terinspirasi dari kesenian tradisional berupa wayang yang dimainkan oleh orang-orang Tionghoa ketika ia masih berada di lingkungan orang-orang Tionghoa Muslim di Palembang hingga sampai mendarat ke Jawa bersama Raden Kusen, yaitu Wayang Potehi. Wayang Potehi yang dimainkan oleh orang-orang berdarah Tionghoa yang berasal dari wilayah Cina selatan (Yunnan, red) ini pun juga sangat digemari serta digandrungi oleh orang-orang Tionghoa di Jawa dan Palembang, terutama orang-orang Tionghoa Muslim yang mana mereka kebanyakan berpegang pada mazhab Hanafi dimana mereka pun juga masih menghargai budaya, politik, kesenian, dan adat masyarakat setempat pun juga ternyata bisa cair pula dengan kehadiran kesenian tradisional khas berupa wayang ini. Pergaulan antara Raden Patah dengan orang-orang Tionghoa Muslim di Palembang dan di Jawa serta ia dikenal sebagai putra selir Maharaja Majapahit Bhatara Prabhu ring Majapahit Sri Kertabhumi yang juga memiliki darah seni yang kental akhirnya membuat Panembahan Jimbun alias Raden Patah pun menaruh minat besar pada kesenian tradisional berupa gamelan dan wayang ini. Sekalipun belum ditemukan data dan informasi lebih mengenai hal ini, kemungkinan besarnya ialah kesenian tradisional berupa Wayang Potehi yang berasal dari daratan Tiongkok selatan juga ikut tersebar di Jawa pada masa Demak berkuasa pada abad XV-XVI M, pada masa dimana Demak juga telah berdiri dan itu adalah masa ketika Panembahan Jimbun berkuasa di atas takhta Demak. Dengan demikian, menjadi sebuah alasan tertentu mengapa Sultan Demak I Prabu

Arya Jimbun ini pun sendiri gandrung terhadap kesenian tradisional Jawa berupa wayang yang sejatinya terpengaruh dari dua hasil karya sastra *rakawi* besar dari India, *Ramayana* karya Rsi Walmiki dan *Mahabharata* karya Bhagawan Wyasa, serta tentunya kesenian tradisional wayang Potehi yang dibawakan oleh orang-orang Tionghoa dari wilayah Tiongkok selatan itu.



Gambar 4.1 Wayang *Sadad* gaya (style) *Surakartan* dengan penggambaran tokoh Sultan Demak I Sri Sultan Surya Alam Akbar Panembahan Palembang Arya Jimbun atau Raden Patah (1478-1518 M). Wayang *Sadad* tokoh Panembahan Jimbun ini dibuat oleh Suryadi Wano Surhardjo pada tahun 1975.

Sumber gambar: Google Image.

Sikap dan pandangan Sultan Demak I Sri Sultan Surya Alam Panembahan Palembang Arya Jimbun (1475-1518 M) yang tidak serta merta meninggalkan corak seni, kebudayaan, dan tradisi tatanan masyarakat Jawa lama yang masih teguh dalam memeluk Hindu-Buddha juga didasarkan pada salah satu sudut

pandang dari pola corak khas Keindonesiaan yang multikulturalis. Masyarakat Indonesia yang menganut asas nilai-nilai multikulturalisme ini juga akhirnya harus menghindari perihal seperti isu-isu SARA, bahkan pula memunculkan pandangan-pandangan etnosentris, stereotip, dan bentuk-bentuk konservatif lainnya. Apabila sudah sampai terjadi pada titik demikian, maka mustahil proses akulturasi-akulturasi maupun asimilasi dapat berlangsung dengan baik, dan justru memunculkan kamufase-kamufase dan konflik-konflik yang dapat mengarah kepada konflik-konflik besar dalam negeri. Oleh sebab itu, maka bentuk-bentuk perilaku yang konservatif dan eksklusif itu perlu untuk ditinggalkan demi menjaga keutuhan jati diri kebangsaan dalam masyarakat majemuk dan heterogen pada bangsa ini.²³ Panembahan Jimbun, penguasa pertama Keraton Islam Jawa Demak pada masa peralihan dari masa Hindu-Buddha ke masa Islam selepas kejatuhan Majapahit di Kotaraja Trawulan tahun 1400 Saka telah banyak memberikan contoh betapa pentingnya juga untuk menjaga warisan luhur bangsa dan masyarakat Indonesia yang pluralis, heterogen²⁴, dan multikulturalis ini. Jimbun juga sama sekali tidak berniat mengubah kiblat Demak Bintoro menjadi kerajaan Islam di Jawa seperti corak Islam yang dipakai oleh para penguasa Islam dari daratan Cina maupun para penguasa Turki Ngerum atau Turki Utsmani itu, karena ia sendiri pun sadar bahwasannya kehidupan masyarakat Nusantara, khususnya di Jawa sendiri masih memegang asas-asas pluralisme dan multikulturalisme dalam

²³ Eko Hendro Punto, "Multikulturalisme Sebagai Model Integrasi Etnis Tionghoa di Indonesia", dalam jurnal SABDA, E-Journal Undip, Vol.8, Tahun 2013, hlm. 35.

²⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Heterogen" memiliki arti Terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat atau berlainan jenis; beraneka ragam. Diakses dari <https://kbbi.web.id/heterogen> pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 12.34 WIB.

hal ini. Tepat seperti yang diwasiatkan oleh mendiang guru sekaligus ayah mertuanya, Kanjeng Susuhunan ing Ampeldenta I Sayyid Ali Rahmad atau Bong Swie Hoo.

Panembahan Bintara Arya Jimbun yang dikenal sebagai Raden Patah dalam historografi tradisional Jawa yang dalam sudut pandang masyarakat pedalaman adalah sosok orang yang haus akan kekuasaan, seringkali digunjing dan mendapat stigma buruk bahwa ia bersifat rakus untuk menguasai baik perpolitikan dan perekonomian-perdagangan di Jawa serta Nusantara, serta lebih banyak bergantung pada kaumnya sendiri sesama orang-orang Tionghoa – menjurus kepada etnosentrisme kaum/kelompok tertentu – pada akhirnya dalam hal ini menunjukkan sendiri bahwa ia pun harus menyesuaikan kembali kiblat masyarakat Indonesia khususnya di tanah Jawa ini. Sekalipun ada begitu banyak perubahan dan perbedaan sudut pandang keagamaan Islam yang telah tumbuh subur di Indonesia, khususnya di Jawa pada abad ke-15 dan 16, namun hal itu sama sekali tidak dapat mengubah akar kebudayaan dan kesejarahan yang sudah tertanam jauh di tanah Jawa ini. Sekalipun ada banyak ragam tradisi, kebudayaan, adat, maupun agama (Hindu, Buddha, Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), serta Kong Hu Chu) yang berkembang dan tumbuh subur di Jawa dan Indonesia ini, mereka tetaplah memiliki satu tujuan bersama dalam keberagaman yang tercipta dari abad ke abad, dari masa ke masa. Tidak bermaksud untuk mengungguli, memojokkan, bahkan merendahkan adat, tradisi, kebudayaan, serta agama atau keyakinan yang dianut oleh orang lain. Hal ini sendiri tercermin dalam Kakawin

Purushadasanta atau Kakawin Sutasoma, pupuh 139, sloka (pada/bait) 5 yang dikarang dan digubah oleh Mpu Tantular yang berbunyi demikian:

*“Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinneki rakwa ring apan kêna parwanosên,
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatattwa tunggal,
Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”*

Terjemahan:

“Dikatakan bahwa hakekat Buddha dan Syiwa merupakan dua hal yang berbeda,

Memang berbeda dan keduanya tak bisa dikenali,

Akan tetapi kebenaran Jina (Buddha) dan Syiwa adalah tunggal adanya,

Sesungguhnya berbeda (tetapi) tetap satu juga tidak ada kebenaran yang mendua”

(Kakawin *Purushadasanta* (Sutasoma), pupuh 139, sloka (pada/bait) 5)

Mengenai sudut pandang pendidikan multikulturalisme, Raden Patah pada masa hidupnya telah berhasil mengaplikasikan nilai-nilai multikulturalisme dalam masa pemerintahannya seperti telah dipaparkan dalam pemaparan panjang-lebar di atas. Dalam sudut pandang dunia pendidikan pada kasus pendidikan multikulturalisme, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengurangi *prejudice* dan diskriminasi untuk berusaha mengarah ke arah persamaan keadilan dan kesempatan yang sama bagi seluruh kelompok/golongan, dan memberi efek distribusi yang baik dari kekuatan anggota masyarakat yang berasal dari adat, tradisi, budaya, dan keagamaan yang berbeda-beda. Pendidikan multikultural ini

juga diterapkan dalam dunia pendidikan di bangku sekolah, dimana konsep pendidikan multikultural ini mendukung reformasi sekolah secara total untuk membuat refleksi tentang keaneka ragaman dalam lingkungan sekolah dan hal-hal lainnya. Peserta didik di sekolah yang berasal dari kelompok mayoritas harus mulai membuka diri dan kemudian berbaur serta menghidupi kehidupan sosial sehari-hari di lingkungan bangku sekolah dengan sesama peserta didik yang berasal dari kalangan keluarga, agama, adat, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda terutama para peserta didik beretnis Tionghoa. Pendidikan multikulturalisme ini perlu dipupuk sejak dini untuk membantu peserta didik di bangku sekolah dapat senantiasa hidup rukun dan damai serta menghargai berbagai perbedaan yang terdapat dalam dunia pendidikan sekolah terutama ketika mereka harus menghargai kebiasaan-kebiasaan dari teman-teman mereka yang berbeda etnis, suku, agama, dan ras. Hal ini penting demi untuk menjaga serta membekali mereka dengan nilai-nilai pluralis dan multikulturalis untuk menghadapi salah satu ancaman disintegrasi kebangsaan yang akhirnya bisa memporak-porandakan ruang lingkup ke-bhinekaan yang sudah seringkali menjalar masuk dan dihadapi oleh Bangsa Indonesia ini.²⁵ Tujuan dari pendidikan multikulturalisme ini pun juga berujung pada sikap penghormatan kepada setiap warga masyarakat, bukan hanya pada lingkungan sekolah maupun kampus perkuliahan (perguruan tinggi, red) semata, tetapi juga menghargai pola sudut pandang kepemimpinan dari kelompok minoritas yang akhirnya tumbuh dan menjelma menjadi pemimpin

²⁵ Ratna Puspitasari, "Multikulturalisme Dalam IPS Pengenalan Relasi Sosial Etnis Tionghoa Dalam Integrasi Bangsa Studi Kritis Kajian Relasi Gender Antar Etnis Tionghoa di Indonesia", dalam jurnal *Edukos*, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2014, hlm. 20-21.

besar kelompok mayoritas. Seperti Raden Patah atau Sultan Demak I Panembahan Palembang Al-Fatah yang merupakan seorang pemimpin berdarah peranakan Tionghoa, tumbuh dan besar dalam didikan kalangan orang-orang berdarah Tionghoa di Palembang dan Jawa, kemudian tampil menjadi pemimpin besar Islam di Jawa yang bukan hanya tampil memimpin untuk kalangan umat Islam belaka tetapi juga masyarakat Jawa yang memeluk keyakinan Syiwa-Buddha Majapahit.²⁶



²⁶ Lihat: (a) Habib Amrulloh, Mas, Azhar Haq, Syamsu Madyan, "Internalisasi Nilai-Nilai Keteladanan Tokoh Islam Raden Patah Pada Pembelajaran PAI Siswa Kelas VIII Studi Kawasan MTs. Al-Hamid Malang", dalam jurnal *VICRATINA* Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 7, 2020, hlm. 92-98; (b) Wawancara dengan Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum, 55 tahun, Dosen Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro Semarang, pada 4 Agustus 2022.